

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Dari Media



BPK Perwakilan
Provinsi Gorontalo

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Tahun

2	0	2	1
---	---	---	---

Harian Umum	Online	Provinsi/Kabupaten/Kota Gorontalo.....
-------------	--------	---



SUASANA pertemuan antara tim Supervisi IV KPK dengan Walikota Gorontalo, Marten Taha yang saat itu didampingi Wakil Walikota, Ryan F. Kono dan jajaran pejabat dilingkup Pemerintah Kota Gorontalo, Kamis (28/1) di ruang kerja walikota. (Foto: Humas)

KPK : Daerah Lain Bisa Mencontoh ke Pemkot

GORONTALO, GP

- Direktur Koordinasi Supervisi IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Rahmat Suwandha memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Gorontalo yang telah sukses dalam melakukan penataan dan pengelolaan pemerintahan di delapan area.

Pemerintah Kota Gorontalo, kata Asep, menempati posisi pertama di tingkat Provinsi Gorontalo. Kemudian disusul Pemerintah Provinsi Gorontalo. "Skornya Pemkot 86. Ranking satu di Provinsi Gorontalo. Ke dua Pemprov Gorontalo," ungkap Asep usai melakukan pertemuan dengan Walikota Gorontalo, Marten Taha yang saat itu didampingi Wakil Walikota, Ryan F. Kono dan jajaran pejabat dilingkup Pemerintah Kota Gorontalo, Kamis (28/1) di ruang kerja walikota.

Tingginya nilai Pemerintah Kota Gorontalo dalam tata kelola pemerintahan di delapan sektor itu, kata Asep, sangat cocok dijadikan pemerintah daerah lain yang ada di Provinsi Gorontalo sebagai contoh.

"Nggak usah jauh-jauh, misalnya ada Kabupaten lain di Gorontalo, nggak perlu belajar ke Surabaya, Bandung, pasti biayanya besar.

Di Gorontalo, ada Kota yang skornya baik gitu ya, tinggal mencontoh aja. Namanya ATM tuh, Amati, Tiru, Modifikasi. Itu aja," kata Asep.

Asep berharap, apa yang dicapai Pemerintah Kota Gorontalo ini dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan. "Harapannya, kalau bisa dipertahankan ya, malah kalau bisa ditingkatkan. Kami harap pula, Pemkot dapat membantu daerah lain," ujar Asep.

Ditempat yang sama, Walikota Gorontalo, Marten Taha mengatakan, untuk mencapai nilai yang baik dalam tata kelola pemerintahan di delapan area itu, pihaknya selalu bersungguh-sungguh dan melaksanakannya sesuai dengan regulasi, mulai dari pengelolaan keuangan, pendapatan, aset, pengawasan, perencanaan

dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa.

"Dan ini yang menjadi komitmen saya dengan teman-teman, bahwa apa yang diamanatkan negara kepadakita harus dijalankan dengan baik. Karena semua ini, penyelenggaraan pemerintahan sudah transparan. Mata semua aparat pemeriks dan pengawas sudah tertuju kepada kita. Mulai dari KPK, BPK, BPKP, kejaksaan, kepolisian, inspektorat. Mulai dari Inspektorat jenderal, inspektorat Provinsi, kota, melihat kita secara nyata. Jadi kita harus transparan, terutama dalam tata pengelolaan keuangan. Insya Allah tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan," kata Walikota.

Ketika ditanya, apakah Pemerintah Kota Gorontalo bersedia menularkan cara menata dan mengelola pemerintahan yang baik kepada daerah lain? Marten menjawab, pihaknya selalu membuka pintu untuk Kabupaten lain yang ingin meniru apa yang dilakukan Pemerintah Kota Gorontalo dalam menata dan mengelola pemerintahan yang baik.

"Kita ada tim. Saya dan pak Wawali selalu memantau mereka. Tim dipimpin pak Sekda, ada Inspektorat dan lain sebagainya. Kita siap untuk menularkan ilmu itu, jika ada daerah lain yang ingin meniru," pungkas Marten.

Sementara itu, terkait penilaian tata kelola pemerintahan masih sementara berlangsung. Pun demikian, nilai Pemerintah Kota Gorontalo dipastikan paling tertinggi tingkat Provinsi. Tahun 2019 lalu, Pemerintah Kota Gorontalo berhasil memperoleh nilai tertinggi tingkat nasional.

Adapun delapan area tata kelola pemerintahan yang dinilai oleh Korsupgah KPK, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan pengelolaan dana desa. Untuk pengelolaan dana Desa, Pemkot tidak termasuk. Sebab, di Kota Gorontalo tidak terdapat Desa. (rwf)